



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R/356 /M.SM.04.00/2020

26 Maret 2020

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : **Persetujuan Pertimbangan Besaran Anggaran
Tunjangan Jabatan Fungsional Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Yth. **Menteri Keuangan**

di

Jakarta

Menindaklanjuti surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) nomor: B/582//HUK.3.2./2020, tanggal 28 Januari 2020, hal: Permohonan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Anggota Polri, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kapolri dengan surat sebagaimana dimaksud di atas pada intinya mengusulkan pemberian tunjangan jabatan fungsional Anggota Polri yang akan diatur dalam Peraturan Presiden.
2. Pemberian tunjangan jabatan fungsional Polri tersebut merupakan tindak lanjut Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Pejabat fungsional Polri diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan jenjang keahlian dan keterampilan yang diatur dengan Peraturan Presiden tersendiri.
3. Jabatan fungsional Anggota Polri dan formasi pegawainya telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri PANRB dan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Pemberian tunjangan jabatan fungsional Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas memperhatikan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan jabatan fungsional Polri diberikan berdasarkan Pangkat tanpa membedakan jenis jabatan fungsional. Hal tersebut untuk menjaga rasa keadilan di antara Anggota Polri baik jabatan struktural dan jabatan fungsional.
 - b. Penentuan kelas jabatan untuk pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Polri juga berdasarkan Pangkat Polri.
5. Berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, bersama ini kami sampaikan usulan besaran dan kebutuhan anggaran untuk pemberian tunjangan jabatan fungsional Anggota Polri sebagaimana terlampir dalam surat ini.

Dalam rangka tertib administrasi dan menjaga akuntabilitas, kiranya seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, tidak ada konflik kepentingan, menerapkan

prinsip kehati-hatian serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, segala hal yang berhubungan dengan pengusulan persetujuan pertimbangan besaran anggaran dimaksud agar dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku pemrakarsa.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Tjahjo Kumolo

Tembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Lampiran Surat
Menteri PANRB
Nomor: R/356 /M.SM.04.00/2020
Tanggal 26 Maret 2020

**USULAN KISARAN BESARAN DAN KISARAN KEBUTUHAN ANGGARAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Pangkat	Jumlah Pemangku (Formasi)	Usulan Kisaran Besaran (Rp)	Usulan Kisaran Kebutuhan Anggaran 14 bulan (Rp)
A	Keahlian				
1	Ahli Utama	Irjen Pol	0	3.062.500 – 4.156.250	0
		Brigjen Pol	8	2.275.000 – 3.087.500	254.800.000 – 345.800.000
2	Ahli Madya	Kombes Pol	132	1.417.500 – 1.923.750	2.619.540.000 – 3.555.090.000
3	Ahli Muda	AKBP	520	882.000 – 1.197.000	6.420.960.000 – 8.714.160.000
		Kompol	815	686.000 – 931.000	7.827.260.000 – 10.622.710.000
4	Ahli Pertama	AKP	529	378.000 – 513.000	2.799.468.000 – 3.799.278.000
		Ipda-lptu	902	343.000 – 465.500	4.331.404.000 – 5.878.334.000
B	Keterampilan				
1	Penyelia	AKP	1.852	378.000 – 513.000	9.800.784.000 – 13.301.064.000
		Ipda-lptu	3.935	343.000 – 465.500	18.895.870.000 – 25.644.395.000
2	Mahir	Bripka-Aiptu	24.915	238.000 – 323.000	83.016.780.000 – 25.644.395.000
3	Terampil	Bripda-Brigadir	38.799	203.000 – 275.500	110.266.758.000 – 149.647.743.000
4	Pemula	Bharada-Abrip	0	168.000 – 228.000	0
JUMLAH			72.407		246.233.624.000 – 334.174.204.000



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Tjahjo Kumolo